

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *E-Government*

2.1.1.1 Konsep dan Definisi *E-Government*

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas pemerintah meningkat (Aziz 2012:3)

World Bank mendefinisikan *e-government* sebagai berikut: *E-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.* Secara garis besar definisi *World Bank* mengenai *e-government* adalah merujuk kepada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan layanan kepada masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan.

Menurut (United Nations Development Programme, 2001), *e-government* merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan definisi diatas dapat kita pahami bahwa *e-government* merupakan perubahan pelayanan

pemerintah dari manual ke digital dengan menggunakan alat teknologi informasi yaitu internet untuk meningkatkan pelayanan yang bersifat transparansi.

Secara nyata teknologi telah membuat proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien serta menawarkan kemudahan pada proses bisnis, seperti peningkatan tata kelola untuk menyampaikan informasi secara real time. Melihat peran pentingnya teknologi yang begitu besar, belakangan ini ada upaya dari pemerintah di berbagai negara di dunia untuk mencoba menghadirkan penerapan teknologi dalam kegiatan pemerintahnya dengan harapan teknologi dapat memberikan efisiensi melalui penyederhanaan dan otomatisasi pengiriman layanan. Kebutuhan akan penggunaan teknologi di pemerintah memunculkan suatu konsep pemerintahan berbasis elektronik atau dengan istilah *e-government*. Secara sederhana, PBB maupun (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2003) mendefinisikan *e-government* sebagai pengguna teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat.

Konsep *E-Government* menurut (Indrajit, 2016) berkembang di atas tiga kecenderungan, yaitu:

1. Masyarakat dibebaskan memilih cara seperti apa dan bagaimana bila ingin berinteraksi dengan pemerintah maupun melakukan transaksi selama 24 jam.
2. Masyarakat bebas memilih saluran apa yang akan digunakan untuk mengakses layanan publik, baik itu yang disediakan oleh pemerintah atau yang dikerjakasamakan dengan pihak lain.

3. Pemerintah harus menjadi pemeran utama dalam mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

2.1.1.2 Manfaat E-Government

E-Government adalah layanan berbasis ICT yang digunakan oleh pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan teknologi.

Menurut (Indrajit, 2016:4) manfaat yang diperoleh dengan menerapkan konsep *e-Government* adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis dan industry) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.
- b. Meningkatkan transparansi, pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka menerapkan konsep *Good Corporate Governance*.
- c. Mengurangi total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah untuk aktivitas sehari-hari.
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Menciptakan lingkungan masyarakat baru yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.

- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Sedangkan Menurut (Hardjaloka, 2014:443) terdapat peluang yang harus dihadapi dengan diterapkannya *e-Government*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efektivitas, Efisiensi, dan Mengurangi Biaya

Dengan menerapkan *e-Government* dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik melalui layanan yang tepat waktu, cepat, dan pelayanan yang merata kepada seluruh pengguna layanan tanpa diskriminasi. Hal ini dikarenakan *e-Government* menggunakan aplikasi berbasis internet yang dapat melakukan pengumpulan, transmisi, penyediaan data dan komunikasi dengan pengguna secara cepat. Dengan adanya pelayanan publik yang efektif dan efisien maka akan mengurangi biaya operasional pemerintah.

2. Meningkatkan Pelayanan

Layanan publik yang fokus pada pengguna layanan merupakan inti dari reformasi pelayanan publik saat ini. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan maka harus dilakukan integrasi *e-Government* antara lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan adanya integrasi maka pengguna layanan dapat mengakses satu website untuk seluruh jenis layanan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai hak untuk berpendapat sehingga dengan menerapkan *e-Government* maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah. Selain daripada itu, partisipasi Masyarakat dalam *e-government* juga dapat berkembang menjadi *e-democracy* dimana masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung melalui media online untuk memilih para pejabat yang duduk di pemerintahan.

4. Meningkatkan Transparansi dan Mengurangi Korupsi

Dengan menerapkan *e-Government* maka masyarakat dapat mengakses segala informasi tentang pemerintah yang dipublikasikan melalui website seperti publikasi rapat, anggaran dan pengeluaran, dan lainnya. Dengan demikian, *e-Government* turut meningkatkan transparansi dalam pemerintahan sehingga dapat memberantas korupsi serta masyarakat dapat turut melakukan kontrol atas kegiatan di pemerintah.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pelayanan pada E-Government

Dalam konsep e-government dikenal empat jenis klasifikasi, hal ini seperti yang dikemukakan (Indrajit, 2016:42) yaitu:

1. *Governments to Citizens (G-to-C)*

Merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Aplikasi ini untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat

dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

2. *Government to Business (G-to-B)*

Adanya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

3. *Government to Government (G-to-G)*

Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan besar, bank-bank asing milik pemerintah di negara lain.

4. *Government to Employees (G-to-E)*

Aplikasi ini untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat.

2.1.1.4 Indikator *E-Government*

Menurut Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003, Indikator *E-Government* adalah sebagai berikut:

1. *Persiapan (Preparation)*, Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam penerapan *e-government* yang mencakup penyusunan kebijakan, strategi, dan perencanaan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada tahap ini pemerintah mulai membangun komitmen organisasi, menetapkan arah kebijakan, serta mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan *e-government*.

2. Pematangan (*Maturation*), Tahap pematangan merupakan proses pengembangan sistem yang telah dirancang agar mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara lebih optimal. Tahap ini meliputi pengembangan aplikasi pelayanan publik, integrasi sistem informasi, serta standardisasi pengelolaan data sehingga proses administrasi pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Pemantapan (*Stabilization*), Tahap pemantapan bertujuan untuk memastikan bahwa sistem *e-government* yang telah dikembangkan dapat beroperasi secara berkelanjutan. Pada tahap ini pemerintah melakukan pemeliharaan sistem, peningkatan keamanan informasi, serta menjamin keberlangsungan layanan elektronik agar tetap berjalan secara optimal.
4. Pemanfaatan (*Utilization*), Tahap pemanfaatan merupakan tahap penggunaan *e-government* secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahap ini sistem dimanfaatkan oleh aparatur pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pemerintahan.

2.1.2 Transparansi

2.1.2.1 Pengertian Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2018 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018), tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai (Widyanti, 2018)

Menurut (Mardiasmo, 2009) transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai pikiran fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Sedangkan menurut (Pemerintah Republik Indonesia, 2010) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010, menjelaskan bahwa transparan adalah memberi informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyuruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Widyanti, 2018).

2.1.2.1 Tujuan Transparansi

Tujuan Transparansi publik atau pemerintahan menurut (Undang-Undang RI, 2008) No. 14 Tahun 2008:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik. Hal ini guna untuk mencegah sedini mungkin terjadinya beberapa penyimpangan melalui kesadaran Masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

2.1.2.2 Prinsip-Prinsip Transparansi

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan bahwa prinsip-prinsip terdiri dari:

1. Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf.
2. Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin kegunaan sumber-sumber daya yang konsisten dan peraturan perundang-undangan.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran.

4. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dan bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas.

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) mengungkapkan 6 prinsip transparansi, yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program.
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

2.1.2.2 Indikator Transparansi

Indikator dari kriteria transparansi berdasarkan UU No.14 Tahun 2008, yaitu:

1. Informatif, informatif menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai pengelolaan anggaran secara jelas, lengkap, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan meliputi kebijakan anggaran, laporan keuangan, mekanisme

pelayanan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2. Keterbukaan, keterbukaan menunjukkan adanya kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik mengenai pengelolaan anggaran tanpa adanya hambatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui proses penyusunan hingga pelaksanaan anggaran daerah. Pengungkapan
3. Pengungkapan, pengungkapan menunjukkan kesediaan pemerintah dalam mengungkapkan seluruh aktivitas dan informasi keuangan secara jujur, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pengungkapan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan.

2.1.3 Pengawasan Internal

2.1.3.1 Pengertian Pengawasan Internal

Pengawasan adalah tindakan nyata dan efektif untuk mencegah, mengetahui kesalahan, membetulkan kesalahan, memelihara kedisiplinan, meningkatkan prestasi kerja, mengaktifkan peranan atasan dan bawahan, menggali sistem-sistem kerja yang paling efektif, serta menciptakan sistem internal kontrol yang terbaik dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan atau organisasi, pegawai, dan masyarakat (Hasibuan, 2019:197)

Menurut (Pemerintah Republik Indonesia, 2008) Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Menurut (Kadarisman, 2019) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan sesuai rencana yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut (Halim, A. & Kusufi, 2020) pengawasan adalah tindakan untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan sebenarnya terjadi atau untuk menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal. Pengawasan dilakukan dalam upaya untuk meyakinkan bahwa implementasi suatu kebijakan telah selesai dengan yang diharapkan. Pengawasan disini diartikan sebagai suatu kegiatan penilaian terhadap suatu objek pengawasan agar mereka melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdaya guna dan berhasil guna. Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan hambatan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Sedangkan menurut (Handoko, 2015) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa pengawasan internal kegiatan dengan tujuan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah mulai dari program yang dilaksanakan hingga pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Pengawasan Internal

Pengawasan internal dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2018) dan (Pemerintah Republik Indonesia, 2008) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan internal memiliki tujuan utama untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, tujuan tersebut dapat dijabarkan menjadi 5 poin sebagai berikut:

1. Menjamin pelaksanaan kegiatan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menjaga keandalan laporan keuangan daerah
3. Menjaga dan mendeteksi terjadinya penyimpangan, kecurangan (*fraud*), serta pemborosan anggaran.
4. Mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

2.1.3.3 Indikator Pengawasan Internal

Menurut (Pemerintah Republik Indonesia, 2008) PP Nomor 60 Tahun 2008, terdapat 3 komponen utama pengawasan internal yang dapat dijadikan indikator dalam penelitian:

1. Perencanaan, Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pengawasan yang meliputi penyusunan rencana kerja pengawasan, identifikasi risiko, serta penetapan program audit agar kegiatan pengawasan dapat berjalan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan organisasi.
2. Pelaksanaan, Pelaksanaan merupakan tahap pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan bukti audit, pemeriksaan terhadap objek yang diawasi, serta menyusun dokumentasi hasil pemeriksaan.
3. Tindak Lanjut, Tindak lanjut merupakan proses pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan untuk memastikan bahwa setiap temuan telah ditangani secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dokumentasi Informasi, Dokumentasi informasi merupakan proses penyimpanan, pengelolaan, dan penyajian seluruh hasil pengawasan secara sistematis sehingga mudah diakses sebagai bahan evaluasi maupun pengambilan keputusan pada masa yang akan datang.

2.1.4 Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan landasan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas bagi masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam mencapai tujuan pembangunan tidak terlepas dari efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Pengelolaan ini dimaksudkan untuk menyelidiki dan mendalami aspek-aspek kunci yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi keuangan publik (Jubaedah, 2022)

Menurut (Peraturan Republik Indonesia, 2019) PP No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah mengatur ruang lingkup keuangan daerah, termasuk pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, serta pengelolaan keuangan daerah, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan memiliki dampak yang positif baik dalam hal akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kinerja keuangan maupun tata kelola keuangan yang lebih baik.

2.1.4.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah

Menurut (Dharmawan, 2022) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip Kehati-hatian

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat, sehingga dapat menghindari risiko kerugian keuangan daerah.

2. Prinsip Keterbukaan

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat membantu dan memeriksa penggunaan dana publik/pemerintah.

3. Prinsip Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi, sehingga dapat memastikan bahwa penggunaan dana publik/pemerintah sesuai dengan tujuan yang lebih diterapkan.

4. Prinsip Efisiensi

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan dana publik/pemerintah dan menghindari pemborosan.

5. Prinsip Keadilan

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan, sehingga dapat memastikan bahwa pengguna dana publik/pemerintah merata dan adil bagi seluruh masyarakat.

2.1.4.3 Kegiatan Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, kegiatan pengelolaan keuangan daerah meliputi lima tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan

Kegiatan perencanaan dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian diturunkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dilanjutkan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Nota kesepakatan dan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-OPD, disusun menjadi Rencana APBD dan setelah disahkan menjadi APBD.. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin agar program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan Pembangunan daerah.

2. Kegiatan Pelaksanaan

Setelah APBD disahkan, kemudian disusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD, setelah disahkan menjadi DPA-OPD. Atas dasar DPA ini Satker Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pelaksanaan pendapatan dan belanja, dan sampai semester pertama dipertanggungjawabkan dalam Laporan Realisasi Anggaran semester Pertama. Tujuan dari pelaksanaan anggaran adalah memastikan bahwa penggunaan dana publik berjalan efektif , efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Kegiatan Penatausahaan

Selama proses pelaksanaan anggaran, Bendahara Penerimaan melakukan penatausahaan penerimaan, penatausahaan Belanja.

4. Kegiatan Pertanggungjawaban

Pada akhir masa pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran melakukan kegiatan pertanggungjawaban melalui Laporan keuangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Untuk menilai kewajaran laporan keuangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan laporan Keuangan Pemda dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar dengan Pengecualian, Tidak Memberikan Pendapat dan Pendapat Tidak Wajar.

5. Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah, yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan memberikan pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan dan konsultasi.

2.1.4.4. Indikator Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah

Menurut PP No.12 Tahun 2019, Indikator Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Ekonomis, Ekonomis menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya dengan biaya yang serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang dihasilkan sehingga dapat menghindari pemborosan anggaran.

2. Efisiensi, Efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan output secara maksimal dengan penggunaan input yang optimal sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara hemat.
3. Efektivitas, Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran, target, serta tujuan program yang telah ditetapkan melalui penggunaan anggaran yang tepat

2.1.5 Kajian Empiris

Sejalan dengan beberapa uraian materi di atas, penulis mengambil referensi dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai masalah yang sama sebagai gambaran mempermudah proses penelitian, berikut diantaranya:

1. As'syifa Qolbi Maharani & Rindu Rika Gamayuni (2025), dengan judul "Pengaruh E-Governmnet dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Hasil uji persial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa e-government berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji simultan dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-government dan transparansi secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kualita laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Sitna Jainuddin, Gaffar & Mattoasi (2024), dengan judul "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Badan Pengelola

Keuangan dan Asset Daerah Kota Tidore Kepulauan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta sistem pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah serta secara simultan transparansi dan akuntabilitas serta sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan.

3. Dini Verdania Latif & Saadah Syakieb Arsalan, dengan judul “Evaluasi Penerapan E-Government Kota Bandung Ditinjau dari Transparansi dan Akuntabilitas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government kota Bandung telah menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel, hanya perlu adanya sedikit penyempurnaan.
4. Ande Anggriawan & Subadriyah (2019), dengan judul “Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Sistem Ajuntansi Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah, pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah dan secara simultan pengawasan internal, pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah.
5. Risya Nurindahari & Rendra Trisyanto (2022), dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi E-Government terhadap Transparansi dan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem informasi E-government berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan berpengaruh secara tidak signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

6. Toni Heryana & Sari Kartika Dewi (2019), dengan judul “Pengaruh Penerapan E-Government terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur”. Hasil penelitian bahwa penerapan e-government memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah.
7. Pardomuan Robinson Sihombing & Ade Marsinta Arsani (2020), dengan judul “Pengaruh Transparansi, LKPD dan PAD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun secara persial transparansi, LKPD dan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
8. Aditya Yudha Pawira Purnomo & Nur Handayani (2019), dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Good Governance dan E-Government terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia good governance dan e-government berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
9. Bella Familia Irene, Iriyadi, David Hasibuan & Windawaty Saurmauli Pangaribun (2024), dengan judul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

dengan Good Governance sebagai Variabel Intervening”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, Good governance memediasi pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, dan Good governance memediasi pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

10. Margareta Llu, M.E.Perseveranada, Yolinda Yanti Sonbay, Henny A.Manafe & Rere Paulina Bibiana (2024), dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Penawaran Internal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah, sementara transparansi tidak memberikan pengaruh signifikan. Pengawasan internal juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Secara simultan, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga penerapan ketiganya secara bersama-sama dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao.
11. Helena Adventy Gudipung, Konstantinus Pati Sanga & Yoseph Darius Purnama Ranga (2024), dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara persial maupun secara simultan Sistem Pengendalian Internal dan

Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan.

12. Syamsul & Siti Zuhroh (2021), dengan judul “Implementasi E-Government: Dampaknya pada Transaparansi Pengelolaan Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government berdampak secara positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
13. Indra Jaya & Ahmad Yamin (2025), dengan judul “Pengaruh Penerapan E-Government, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel e-government, akuntabilitas, dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Secara parsial, e-government dan transparansi menunjukkan pengaruh yang signifikan, sementara akuntabilitas menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan.
14. Maria Grasiana Yuliana Mau, Ati Retna Sari & Mochamad Fariz Irianto (2025), dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Penerapan Prinsip Transparansi, Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi, penerapan transparansi dan pengawasan keuangan terpadu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
15. Hari Sriwijayanti (2020), dengan judul “Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

terhadap Pengelolaan APBD”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pejabat pengelola APBD tentang transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan SIAKD berpengaruh signifikan terhadap APBD baik secara parsial maupun simultan.

16. Dito Aditia Darma Nasution (2019), dengan judul “Analisi Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah, secara parsial transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah. Secara simultan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah.
17. Diana Noba Lintong, David Paul Elia Saerang & Ventje Ilat (2021), dengan judul “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah kota Kotamubagu. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah kota Kotamubagu. Sedangkan, pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada kota Kotamobagu.

18. Ibnu Hamzami Ulfi, Nunuy Nur Afiah & Sri Mulyani (2022), dengan judul “Implementasi Belanja Modal dan E-Government terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Bangka Belitung dan Sumatera Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal secara persial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio independensi. Pelaksanaan e-government berpengaruh positif dan berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian belanja modal dan pelaksanaan e-government secara bersamaan berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan.
19. Fatimah Elka & Wahidahwati (2020), dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
20. Bambang Jatmiko (2020), dengan judul “Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transaparansi terhadap Kinerja Pemerinntah Daerah Kabupaten Sleman”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Table 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Rencana Penelitian Penulis

Nomor	Penelitian dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	As'syifa Qolbi Maharani & Rindu Rika Gamayuni (2025) Pengaruh E-Government dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: Pengaruh E-Government, dan Transparansi Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Metode: kuantitatif	Variabel Independen: Pengawasan Internal	e-government berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sedangkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntanssi Pajak. Vol.2 No.3 Tahun 2025. ISSN. 3046-8124
2	Sitna Jainuddin, Gaffar & Mattoasi (2024) Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Tidore Kepulauan	Variabel Independen: Pengaruh Transparansi Variabel dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: E-Government dan Pengawasan Internal.	Transparansi berpengaruh positif dan signifikan, akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan, sistem pengendalian berpengaruh positif dan signifikan, serta secara simultan transparansi, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan.	Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 5 No. 12 Tahun (2024). ISSN. 2747-0490
3	Dini Verdania Latif & Saadah Syakieb Arsalan (2019)	Variabel Independen: E-Government Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Transparansi dan Pengawasan Internal	E-Government kota bandung telah menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel hanya perlu adanya	<i>Journals of Economics Development</i> Issue Vol. 2 No. 2 Tahun (2019). ISSN. 2614—2384

	Evaluasi Penerapan E-Government Kota Bandung Ditinjau dari Transparansi dan Akuntabilitas.		Variabel Dependen: Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerin	sedikit penyampuran.	
4	Ande Anggriawan & Subadriyah (2019)	Variabel Independen: Pengawasan Internal	Variabel Independen: E-Government dan Transparansi Anggaran	Pengawasan Internal Berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah, pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah dan secara simultan berpengaruh signifikan.	Jurnal Rekognisi Akuntansi. Vol. 1 No. 1 ISSN
	Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah	Variabel Dependen: Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Metode: Kualitatif		
5	Risya Nurindahari & Rendra Trisyanto (2022)	Variabel Independen: Penerapan E-Government	Variabel Independen: Transparansi dan Pengawasan Internal	Sistem Informasi E-Government berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan berpengaruh secara tidak signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah	<i>Indonesian Accounting Research Journal</i> . Vol. 2, No.3 Tahun (2022) ISSN 2747-1241
	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi E-Government terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Daerah	Metode: Kuantitatif		
6	Toni Heryana & Sari Kartika Dewi (2019)	Variabel Independen: Penerapan E-Government		E-Government memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 1 No. 1 Tahun (2019) ISSN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaruh Penerapan E-Government terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Kabupaten Cianjur	Variabel Dependen: Pengelolaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Metode: Kualitatif	pengelolaan kinerja keuangan pemerintah daerah	
7	Pardomuan Robinson Sihombing & Ade Marsinta Arsani (2020)	Variabel Independen: Pengaruh Transparansi	Variabel Independen: E-Government dan Pengawasan Internal	Transparansi, LKPD dan PAD berpengaruh signifikan positif secara simultan ataupun persial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Ecconomica Vol. 4 No. 2 Tahun (2020) ISSN 2549-8932
	Pengaruh Transparansi, LKPD dan PAD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Metode: Kuantitatif		
8	Aditya Yudha Pawira Purnomo & Nur Handayani (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen: Transparansi Anggaran Pengawasan Internal	Kompetensi sumber daya manusia, good governance e-government berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntans Vol. 8 No. 12 ISSN 2460-0585
	Good Governance dan E-Government terhadap Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	Metode: Kausal Komparatif		
9	Bella Familia Irene, Iriyadi, David Hasibuan & Windawaty Saurmauli Pangaribun	Variabel Independen: E-Government	Variabel Independen: Transparansi dan Pengawasan Internal	Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah	Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing Vol. 5 No. 1 Tahun (2024) ISSN 2723-2522

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Instansi pemerintah daerah dengan Good Governance sebagai Variabel Intervening	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Metode: Kuantitatif		Daerah, pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah	
10	Margareta Llu, M.E Perseyernada Yolanda Yanti Sonbay, Henny A Manafe & Rere Paulina Bibiana (2024) Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengawasan Internal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao	Variabel Independen: Pengaruh Transparansi dan Pengawasan Internal Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Pengaruh E-Government	Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sementaraa transparansi tidak berpengaruh signifikan, pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	<i>Management Student and Enterprenship Journal</i> Vol. 5 No. 2 ISSN 9751-9766
11	Helena Adventy Gudipung, Konstantinu Pati Sanga & Yoseph Darius Purnama Rangga (2024) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan	Variabel Independen: Penngawasan Internal Variabel Dependen: Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif	Varabel Independen; E-Government dan Transparansi	Sistem Pengendalian internal dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan ssecara persial dan simultan terhadap keandalan penyajian laporan keuangan.	Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi Vol. 2 No. 4 Tahun (2024) ISSN 3031-3384

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keuangan Daerah terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				
12	Syamsul & Siti Zuhroh (2021) Implementasi E-Government: Dampaknya pada Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Independen: E-Government Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Daerah Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Transparansi dan Pengawasan Internal	Implementasi E-Government berdampak positif terhadap transparansi Pengelolaan keuangan daerah	Jurnal Riset Terapan Akuntansi Vol.5 No.1 Tahun 2021 ISN 2622-7940
13	Indra Jaya & Ahmad Yamin (2025) Pengaruh Penerapan E-Government, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Variabel Independen: E-Government dan Transparansi	Variabel Independen: Pengawasan Internal Variabel Dependen; Kinerja Keuangan Daerah	E-Government, Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat secara parsial e-government, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan sementara akuntabilitas positif namun tidak signifikan.	Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Vol. 8 No. 5 Tahun (2025) ISSN 2614-8854
14	Maria Grasiaana Yuliana Mau, Ati Retna Sari & Mochamad Fariz Irianto (2025) Pengaruh Penerapan	Variabel Independen: Transparansi dan Pengawasan Variabel Dependen:	Variabel Independen: E-Government	Sistem Informasi Akuntansi, penerapan transparansi dan pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.	Jurnal Akuntansi Neraca. Vol. 2 No. 4 ISSN 2987-1352

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sistem Informasi Akuntansi, Transaparansi, Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan	Pengelolaan Keuangan Daerah Metode: Kuantitatif		pengelolaan keuangan daerah.	
15	Hari Sriwijayanti (2020) Analsis Pengaruh Transparansi Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan APBD	Variabel Independen: Transparansi	Variabel Independen: E-Government dan Pengawasan Internal Variabel Dependen: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Metode: Kualitatif	Transparansi, akuntabilitas dan pemanfaatan SIAKD berpengaruh signifikan terhadap APBD baik secara parsial maupun simultan.	Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi. Vol.7 No.1 Tahun (2020) ISSN 2527-9483
16	Dito Aditia Darma Nasution (2019) Analisi Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transsparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	Variabel Independen: Transparansi Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: E-Government dan Pengawasan Internal	Pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, secara simultan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah	Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan Vol. 2 No. 3 Tahun (2018) ISSN 2597-7601
17	Diana Noba Lintong, David Paul	Variabel Independen; Pengawasan	Variabel Independen: E-Government	Implementasi istem akuntansi berpengaruh signifikan dan	Jurnal Accountabilit y Vol.6 No.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Elia Saerang & Ventje Ilat (2021)	Interanl Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah Daerah	dan Transparansi Metode: Kualitatif	positif terhadap Kinerja pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.	Tahun 2021 ISSN. 2338- 3917
18	Ibnu Hamzami Ulf, Nunuy Nur Afiah & Sri Mulyani (2022)	Variabel Independen: E-Government Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Metode; Kuantitatif	Variabel Independen; Transparansi dan Pengawasan Internal	Belanja modal secara persial tidak berpengaruh terhadap kinerj keuangan pemerintah daerah. Pelaksanaan e- government berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Belaja modal dan pelaksanaan e- government Secara simultan berpengaruh positif signifikan	<i>Indonesian Governance Journal</i> Vol. 5 No. 2 ISSN 2721-1991
19	Fatimah Elka & Wahidahwati (2020)	Variabel Independen: Transaparani Variabel Dependen: Kinerja	Variabel Independen: E-Government dan Pengawasan	Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 9 No.3 ISSN 2460-0585

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Transparansi Pengelolaan Keuangann Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	Internal Metode; Kualitatif	Kinerja pemerintah daearh.	
20	Bambang Jatmmiko (2020) Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas , dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	Variabel Independen; Pengawasan Internal dan Transparansi Variabel Dependen; Kinerja Pmerintah Daerah	Variabel Independen; E- Government Metode: Kualitatif	Pengawasan Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daearh, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, Tranparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.	Jurnal Akuntansi Trisakti Vol. 7 No. 2 Tahun (2020) ISSN 2339-0832
Linda Paujiah (2025) Pengaruh Penerapan E-Government, Transparansi Anggaran, dan Pengawasan Internal terhadap Pengelolaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023					

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan kinerja keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat berlangsung dalam lingkungan tata kelola publik yang terus berkembang, terutama setelah kuatnya tuntutan digitalisasi melalui e-government, keterbukaan informasi publik, serta penguatan pengawasan internal. Ketiga aspek tersebut menjadi faktor fundamental untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara akuntabel, transparan, dan mencerminkan kepentingan masyarakat. Kerangka pemikiran penelitian ini bertumpu pada dua teori besar dalam tata Kelola sektor publik, yaitu *Agency Theory* dan *Stewardship Theory*, yang

memberi perspektif berbeda namun saling melengkapi dalam menjelaskan perilaku pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan publik.

Agency Theory memandang hubungan antara pemerintah daerah (agent) dan masyarakat atau publik (principal) sebagai hubungan yang rentan terhadap asimetri informasi dan moral hazard. Pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah mengelola keuangan publik memiliki informasi yang lebih besar daripada masyarakat, sehingga terdapat potensi perilaku oportunistik, ketidak transparanan, dan penyimpangan anggaran jika tidak terdapat mekanisme pengawasan dan keterbukaan yang memadai. Dalam kerangka ini, penerapan e-government, transparansi anggaran, dan pengawasan internal berfungsi sebagai instrument yang mengurangi asimetri informasi, memperkuat kontrol, dan memperkecil peluang agent bertindak tidak sesuai kepentingan principal. E-Government menyediakan jejak digital yang mudah diaudit, transparansi anggaran membuka akses informasi kepada publik, dan pengawasan internal memastikan regulasi dipatuhi. Dengan demikian, teori agensi menjelaskan mengapa mekanisme tersebut dibutuhkan: untuk mengatasi ketidakseimbangan informasi dan membatasi perilaku oportunistik pemerintah daerah.

Namun, Stewardship Theory memberikan perspektif yang berbeda sekaligus melengkapi. Teori ini berasumsi bahwa pemerintah sebagai pengelola keuangan publik tidak selalu bertindak oportunistik, melainkan dapat berperilaku sebagai steward yang memiliki komitmen instrinsik untuk melayani kepentingan masyarakat. Dalam pandangan stewardship, pemerintah daerah dapat termotivasi oleh nilai pelayanan publik, profesionalitas, dan integritas birokrasi, sehingga

penerapan e-government, transparansi anggaran, dan pengawasan internal tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen moral dan profesional untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. E-government dipandang sebagai inovasi untuk meningkatkan efektivitas layanan; transparansi anggaran sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap publik; dan pengawasan internal sebagai instrument untuk memastikan kualitas kinerja, bukan semata-mata untuk menangkap penyimpangan. Dengan landasan stewardship, pemerintah yang baik akan berupaya mencapai kinerja keuangan terbaik meskipun tanpa tekanan eksternal yang besar, karena motivasinya berasal dari integritas dan orientasi pelayanan.

Integrasi kedua teori ini menjadi penting karena tata kelola sektor publik tidak dapat dijelaskan oleh satu teori saja. Dalam banyak kondisi, pemerintah mungkin menunjukkan perilaku agent yang memerlukan kontrol dan transparansi, tetapi dalam kondisi lain mereka juga dapat bertindak sebagai steward yang menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, penerapan e-government, transparansi anggaran dan pengawasan internal dapat dipahami sebagai instrument yang bekerja dalam dua ranah; sebagai mekanisme pengurangan konflik kepentingan menurut Agency Theory, dan sebagai bentuk nyata dari komitmen pelayanan publik menurut Stewardship Theory.

Penerapan e-government menjadi instrument penting karena digitalisasi proses keuangan menjadi sebab meningkatnya akurasi data, kecepatan proses, serta kemudahan penelusuran transaksi. Sistem digital seperti e-budgeting, e-planning, atau aplikasi pelaporan keuangan menghasilkan jejak digital audit yang lebih jelas

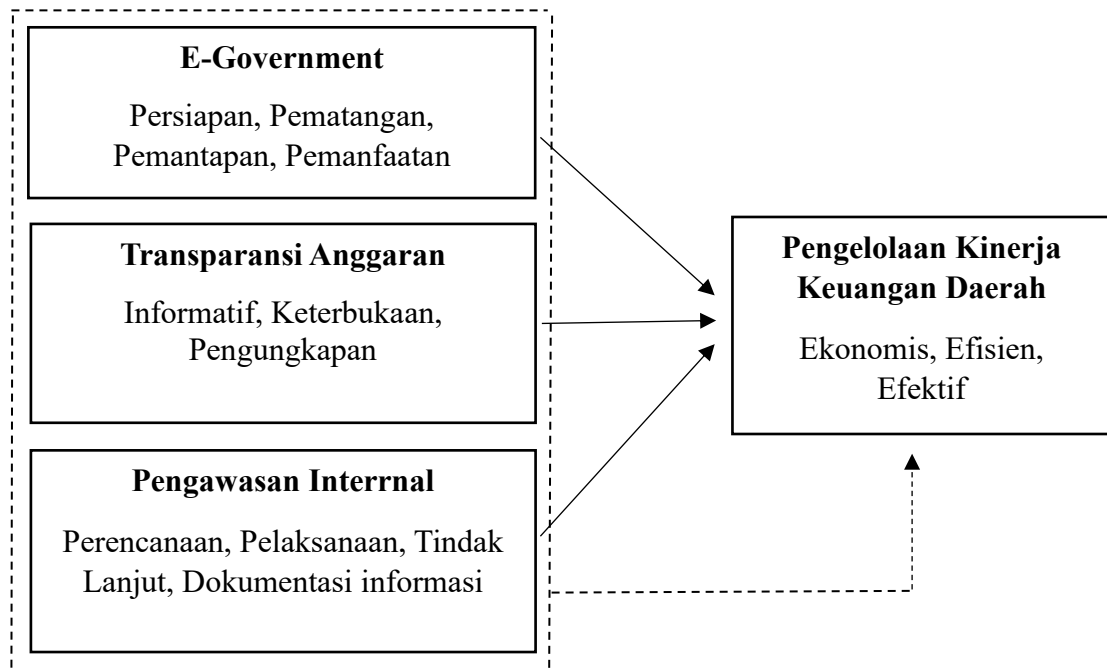
sehingga mengurangi peluang manipulasi dan kesalahan. Keberadaan sistem yang terintegrasi dan terdokumentasi tersebut mengakibatkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Efek sebab-akibat ini konsisten dengan temuan penelitian (Ulfi, 2022), (Heryana, 2013), serta (Maharani & Gamayuni, 2025) yang membuktikan bahwa peningkatan pemanfaatan e-government berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan maupun kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, e-government menjadi faktor yang secara mekanis mendorong perbaikan pengelolaan kinerja keuangan daerah.

Transparansi anggaran juga merupakan variabel yang memiliki hubungan sebab-akibat yang kuat dengan pengelolaan kinerja keuangan. Sebabnya, keterbukaan informasi anggaran memungkinkan masyarakat, legislatif, dan berbagai pihak eksternal untuk turut mengawasi proses keuangan daerah. Keterbukaan tersebut menurunkan tingkat asimetri informasi antara pemerintah dan publik, sehingga pemerintah menjadi lebih disiplin dalam menyusun, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan anggaran. Transparansi yang baik berakibat pada meningkatnya akuntabilitas, efisiensi, serta kualitas keputusan fiskal pemerintah daerah. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Jainuddin et al., 2024), (Sihombing & Arsani, 2020), serta (Elkha & Wahidawati, 2020) yang menunjukkan bahwa transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap peningkatan pengelolaan kinerja keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan Agency Theory dan Stewardship Theory yang sama-sama menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah kunci meningkatkan pengelolaan kinerja keuangan.

Faktor berikutnya, pengawasan internal juga memiliki hubungan sebab akibat yang jelas terhadap pengelolaan kinerja keuangan daerah. Sebabnya, fungsi pengawasan internal melalui audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan tindak lanjut oleh APIP mampu mendeteksi kelemahan sistem dan penyimpangan sejak dini. Ketika pengawasan dilakukan secara berkualitas, rekomendasi perbaikan akan mendorong peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, peningkatan disiplin anggaran, serta perbaikan roses keuangan. Kondisi ini berakibat pada meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan akurasi pengelolaan inerja keuangan daerah. Hubungan sebab akibat tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Anggriawan, 2017), (Familia Irene et al., 2024), dan (Helena Adventy Gudipung et al., 2024), yang secara konsisten menemukan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah maupun kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, pengawasan internal menjadi instrument penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Berdasarkan integrasi teori dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-government, transparansi anggaran, dan pengawasan internal merupakan faktor yang menjadi sebab langsung meningkatkanya akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan kinerja keuangan daerah. Ketiganya mengurangi asimetri informasi dan moral hazard sebagaimana dijelaskan dalam Agency Theory, sekaligus memperkuat komitmen profesional sesuai Stewardship Theory. Oleh karena itu, semakin kuat penerapan e-government, semakin tinggi transparansi anggaran, dan semakin efektif pengawasan internal maka

mengakibatkan semakin baiknya pengelolaan kinerja keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.



Keterangan:

———— = Secara Parsial

----- = Secara Bersama-sama

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga *e-government* berpengaruh positif terhadap pengelolaan kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

2. Diduga transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
3. Diduga pengawasan internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
4. Diduga secara bersama-sama e-government, transparansi anggaran, dan pengawasan internal berpengaruh terhadap pengelolaan kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.